
Gerakan Sosial Dalam Politik Luar Negeri Pada Masa Megawati

Yola Dwi Julianti^{1*}

*E-mail: yoladwijulianti@gmail.com

¹Sarjana Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia

Abstrack:

The purpose of this study is to describe the Social Movements in Foreign Politics. The method used in this study uses a qualitative descriptive approach using secondary data. The purpose of this descriptive research is to make systematic, factual, and accurate predictions of facts. Meanwhile, secondary data is written data that can be obtained from books, scientific magazines, archives from institutions, program accountability reports, as well as official documents such as results studies, theses, survey results, historical studies, internet sources. And these references can be searched from books, journals, research report articles, and sites on the internet. The conclusion obtained from the results of this study is that social movements in foreign policy during Megawati's time originated and were driven by the community in an effort to demand changes to institutions, regulations or government structures.

Keywords: *Social Movement, Foreign policy during Megawati's time*

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Dalam sekesta teoritik ilmu sosial penjelasan mengenai gerakan sosial begitu beragam serta tidak dapat digeneralisir antara teori yang satu dengan yang lain, beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial lebih dari sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif. Dari kepentingan yang berbeda maka pertentangan akan melahirkan dengan istilah "perjuangan kelas". Yakni dimana kelas yang didominasi atau tereksplotasi akan melakukan penentangan dan mengambil alih kebijakan. Menurut Macionis gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditunjukkan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Dari defenisi gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Macionis tersebut, maka dapat digaris bawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni adanya aktivitas yang diorganisir dan ada tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.(Purboningsih, 2015)

Kajian Gerakan sosial mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir Periode pertama berlangsung antara 1940 sampai 1960 yang lebih menekankan pada aspek irasional, periode kedua berawal tahun 1960 dengan fokus pada gerakan kemasyarakatan sebagai aktor rasional di dalam struktur sosial, serta periode ketiga dimulai 1970-an dengan menekankan pada dekonstruksi gerakan sosial.⁴ Penelitian gerakan sosial baik studi kasus maupun pendalaman teori telah banyak dilakukan dan dapat ditemukan dalam berbagai publikasi. Studi gerakan sosial lebih jauh tidak lagi didominasi kalangan akademisi negara-negara Eropa dan Amerika Utara dengan menitik beratkan berbagai contoh kasus gerakan sosial di negara mereka, tetapi telah menjadi focus akademisi negara-negara dunia ketiga dengan isu, aktor dan organisasi gerakan yang bervariasi(' , 2013).

Di Indonesia, gerakan sosial diwujudkan dalam berbagai bentuk gerakan, Tokohnya pun merupakan orang-orang yang independen yang tidak terkait langsung dengan kekuasaan negara diawali dari masa menjelang Orde Baru hingga munculnya gerakan perlawanan petani, gerakan buruh, gerakan masyarakat sipil yang menuntut demokrasi hingga gerakan politik. sebagian besar sosiolog Amerika pada 1950. Pada 1960 terjadi kemunculan berbagai bentuk gerakan dengan tujuan yang berbeda, hal tersebut membuat kajian terhadap gerakan sosial diminati sebagian besar para sosiolog. Masih dengan tahun yang sama, gerakan sosial dibagi menjadi dua bagian yaitu terdiri dari Gerakan sosial lama dan Gerakan sosial baru (Kosanke, 2019).

Ciri-ciri gerakan sosial lama adalah memiliki struktur organisasi, ada pelekat ideologi dan harus go public artinya kelompok itu memiliki identitas yang jelas dan dikenal oleh khalayak umum. Contoh organisasi ini adalah kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat atau ormas. Gerakan sosial lama menekankan bahwa politik selalu berbicara kepentingan orang banyak yang harus diperjuangkan ke pemerintah. Anggota gerakan sosial bisa dikatakan lebih plural karena memiliki anggota yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Terkadang gerakan sosial ini dalam pergerakannya bisa sangat bersifat revolusioner dalam melakukan aksinya. Mereka dalam melakukan aksinya dilatarbelakangi oleh kegelisahan atau kekecewaan terhadap kebijakan maupun pemerintahan (Purboningsih, 2015)

Gerakan sosial baru muncul seiring dengan perubahan bentuk masyarakat, perkembangan masyarakat kekinian tentu juga pertimbangan perihwal bagaimana mengamati bentuk gerakan sosial yang muncul, strategi yang digunakan, serta visi dan perubahan yang ingin dicapai. Para teroretikus sosial juga telah mengembangkan pemikirannya dalam merumuskan masyarakat kontemporer. Alain Touraine menyebut masyarakat kekinian sebagai masyarakat terprogram, Daniel Bell memakai istilah masyarakat Post Industri, Jean Baudrillard menyebutnya sebagai masyarakat postmodern, Jean-François Lyotard menggunakan istilah masyarakat terkomputerisasi, Anthony Giddens punya istilah kapitalisme lanjut. Pada intinya, pemikiran mereka menyebut adanya pengaruh perkembangan teknologi, kapitalisme dan industri yang eksekutif terhadap kebudayaan masyarakat (Prasisko, 2016)

Gerakan Politik merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam politik yang memiliki pengertian yang berbeda dengan partai politik maupun kelompok kepentingan. Gerakan Sosial-Politik merupakan aspek dinamis, dalam kehidupan politik yang sering terjadi dalam masyarakat, utamanya adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan ekonomi, sosial-budaya dan khususnya politik. Gerakan politik juga sangat berkaitan dengan gerakan sosial. Dan ada beberapa jenis dalam gerakannya diantaranya: (1) Gerakan Portes, gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. (2) Gerakan regresif, gerakan yang bertujuan membalikan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan portes. Gerakan politik juga sangat dekat dengan tuntutan untuk melakukan perubahan sosial dan perubahan kondisi politik dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan untuk teori perubahan sosial (transformasi sosial) penulis menggunakan Teori Kelompok Strategik dari Evers dan Schiel teori ini memahami bahwa sebuah perubahan sosial yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat berdasarkan pada perilaku manusia yang dikawal oleh kepentingan dalam mencari keuntungan secara maksimum, selain itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor tindakan sosial berupa cinta atau kebencian serta iri hati atau kagum(Hardianto, 2020).

2. METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan Teknik penyusunan yang sistematis untuk memudahkan Langkah-langkah yang akan diambil. Metode yang digunakan penulis untuk Menyusun penelitian yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi (Putri et al., 2021). Referensi ini dapat dicari dari Buku, Jurnal, Artikel, Laporan Penelitian dan Situs-Situs Internet(Sadikin, 2017). Sedangkan data sekunder merupakan data tertulis yang dapat diperoleh dari Buku, Majalah Ilmiah, Arsip dan Instansi laporan pertanggung jawaban program, maupun dokumen resmi seperti hasil-hasil studi, tesis, hasil survei, studi historis, sumber internet, dan sebagainya(Agustinova, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gerakan Sosial

Dalam istilah sosiologis, diketahui bahwa sosiolog yang berbeda memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara terbaik untuk memahami apa arti sebenarnya dari “gerakan sosial” Misalnya, Cohen (1983) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengungkapkan “Gerakan sosial” adalah suatu Gerakan yang dilakukan oleh beberapa individu yang terorganisasi secara alamiah dengan tujuan mengubah atau mempertahankan ciri-ciri tertentu dalam masyarakat secara luas(Haris et al., 2019).

Gerakan sosial dimulai sebagai respons terhadap masalah yang disebabkan oleh ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap individu dalam masyarakat. Gerakan sosial ini biasanya memanifestasikan dirinya sebagai protes atau unjuk rasa di sekitar insiden atau di depan badan legislatif atau eksekutif. Situasi ini menunjukkan bahwa lebih banyak prospek munculnya Gerakan sosial jika system politik lebih transparan dan demokratis (Ii et al., 1964). Dalam gerakan sosial, aktor-aktor terlibat secara mandiri dan diikat oleh suatu identitas kolektif yang dibangun atas dasar kebutuhan dan kesadaran untuk keterhubungan (Ii, 1970).

Dapat ditarik kesimpulan yang bersifat spekulatif bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang berasal dan digerakkan oleh masyarakat dalam upaya menuntut perubahan terhadap institusi, regulasi, atau struktur pemerintahan. Karena gerakan sosial berasal dari lingkungan sekitar, setiap kekurangan dalam badan pemerintahan terungkap. Gerakan masyarakat yang menuntut perubahan institusi, pejabat, atau kebijakan akan berujung pada pemenuhan tuntutan sosial jika tuntutan tersebut tidak diwujudkan. Di sisi lain, jika gerakan sosial didorong secara ideologis, mereka hanya akan melampaui reformasi kelembagaan dan menghasilkan perubahan mendasar dalam cara pendekatan pemikiran dan kebijakan pemerintah (Manulu, 2016).

Menurut McAdam dkk, para ilmuwan gerakan sosial dari berbagai negara yang mewakili tradisi teoritis yang berbeda menekankan pentingnya tiga faktor dalam menganalisis tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial. Tiga faktor ini adalah struktur kesempatan politik dan kendala yang dihadapi gerakan; bentuk-bentuk organisasi, tersedia untuk mengacau, dan proses kolektif menafsirkan, memberi atribut, dan mengkonstruksi sosial yang menjembatani antara kesempatan dan tindakan. Atau merujuk pada ketiga faktor dengan sebutan singkatan konvensional yaitu: kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembersihan (Hassanudin, 2013).

2. Pengertian Politik

Politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Lebih sederhananya, politik dapat dipahami sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Politik terdiri dari kegiatan organisasi dalam hal mana manusia di dalamnya berusaha memaksimalkan keyakinan mereka mengenai nilai-nilai sosial. Definisi mengenai politik serupa ini adalah luas dalam penggunaannya terhadap berbagai tindakan manusia dalam hal politik. Jika suatu manusia tidak menyepakati terhadap suatu nilai-nilai sosial tersebut, maka akan terjadi perlawanan terhadap nilai-nilai tersebut. Para pemimpin patutlah menyalurkan setiap aspirasi masyarakatnya. Agar aspirasi masyarakat yang diwakilkan pemerintah tersebut dapat dijalankan, baik dalam urusan di dalam maupun di luar negeri demi tercapainya tujuan nasional (Prasisko, 2016).

Politik selalu memiliki semacam konflik yang terjadi, dan konflik itu selalu ada hubungannya dengan kekuasaan. Konflik yang dimaksud selalu melibatkan sekelompok individu yang berusaha mengungkapkan perasaannya dan yang mungkin tujuannya adalah munculnya peringatan baru atau pengejaran nilai-nilai dalam kebijakan baru yang dilakukan

oleh pejabat pemerintah. Mungkin ada kelompok sosial yang ingin melemahkan pemerintah untuk menciptakan undang-undang atau struktur pemerintahan baru (Massa, 2018).

Suatu cara bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam politik dengan keyakinan yang berbeda dari partai politik atau badan pemerintahan dikenal sebagai politik sosial. Gerakan sosial politik merupakan aspek fundamental dari kehidupan politik yang sering mempengaruhi semua masyarakat, terutama yang kini mengalami perubahan ekonomi, masyarakat, dan yang paling penting, politik (Massa, 2018).

3. Pengertian Politik Luar Negeri

Gagasan mendasar yang harus kita pahami untuk mempelajari kebijakan luar negeri adalah bahwa pada dasarnya itu adalah "teori tindakan", atau pendekatan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain untuk memajukan kepentingannya sendiri. Politik luar negeri secara garis besar adalah kumpulan rumusan nilai, sikap, orientasi, dan tujuan yang dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kepentingan nasional di luar negeri. Sebuah komitmen, yang pada dasarnya merupakan pendekatan mendasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks lokal maupun internasional, menentukan peran suatu negara dalam urusan global atau lingkungan (Dewi, 2013).

Metode paling sederhana untuk memahami kebijakan luar negeri adalah memecahnya menjadi dua kategori: politik dan kebijakan luar negeri. Politik (kebijakan) adalah tujuan tertentu yang berfungsi sebagai katalisator perubahan atau tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan itu sendiri didasarkan pada konsep "pilihan (pilihan)": memilih arah tindakan atau menciptakan dukungan, sedangkan gagasan yang mengenai kedaulatan dan konsep "wilayah" akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (foreign). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (foreign policy) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara (Yani, 2007).

Tugas yang paling sering dan spesifik negara adalah: 1. Mempertahankan keamanan nasional, misalnya dengan membangun kekuatan militer dan membuat pakta keamanan dengan negara lain; 2. Mempromosikan pembangunan negara dan wilayah yang penting secara strategis melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral; 3. Memelihara dan meningkatkan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan nasional, misalnya dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan penanaman modal asing 4. Mempromosikan martabat manusia, misalnya dengan menerapkan rencana hak asasi manusia dan bantuan. Kegagalan negara untuk mencapai

tujuan lain (seperti menyebarkan ideologi politik atau agama) atau asumsi bahwa setiap negara terlibat dalam kebijakan luar negeri di bawah fungsi tertentu, atau asumsi bahwa setiap negara tertentu mengejar tujuan ini secara meyakinkan, membuat latihan mengidentifikasi fungsi kebijakan luar negeri berarti (Setiawan & Sulastri, 2017).

4. Megawati Soekarno Putri

Megawati Soekarnoputri merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari presiden Indonesia pertama, Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Bidang ekonomi Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Megawati Soekarnoputri dalam masa pemerintahannya dimana sistem pemerintahannya disebut kabinet gotong royong, Megawati Soekarnoputri berusaha memperbaiki keadaan Indonesia, sekaligus memperbaiki situasi ketidakpastian Megawati Soekarnoputri memperlihatkan kepada publik langkah apa yang pasti untuk memulihkan iklim investasi menjadi kondusif, menaikkan produktifitas dan efisiensi serta membangun stabilitas politik dan keamanan Nasional (Pratiwi, 2015).

5. Politik Luar Negeri Masa Megawati

Didalam kebijakan Politik luar negeri Indonesia mengutamakan prinsip bebas dan aktif, di mana bebas berarti Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan dunia dan Indonesia juga bebas dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan negara Indonesia, Indonesia juga aktif dalam urusan dunia internasional di mana Indonesia ikut andil dalam percaturan politik internasional baik itu membantu menyelesaikan permasalahan internasional maupun ikut membantu menjaga perdamaian dunia (Muttaqien & Dharmaputra, 2013).

Dibawah kepemimpinan Megawati, Indonesia sedang dilanda berbagai ancaman terorisme di beberapa titik di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pada pemerintahan Megawati lebih berfokus pada peningkatan keamanan negara yaitu penanggulangan terorisme (Muttaqien & Dharmaputra, 2013). Tindakan terorisme seperti Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang dinilai tidak kondusif untuk investasi. Banyak negara yang memindahkan (relokasi) investasinya keluar Indonesia dengan alasan keamanan. Hal ini telah memberburuk keadaan ekonomi Indonesia (Wahyuni, 2008).

Bersangkutan dengan adanya peristiwa Bom Bali berdampak langsung pada kondisi investasi, pemerintah mulai melakukan upaya untuk meningkatkan kembali investasi di

Indonesia. Baik itu domestik ataupun asing. Yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tergolong masih lambat. Misalnya Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam berbagai kesempatan telah melobi para kepala negara dan para kepala pemerintahan, agar pengusaha di negaranya mau menanamkan investasi di Indonesia, menghadiri forum-forum bisnis di sela-sela kunjungan di negara-negara sahabat. Disamping itu berbagai promosi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia (Wahyuni, 2008).

Pada masa pemerintahan Megawati, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan kembali, yaitu dengan menempatkan kembali ASEAN sebagai batu pijakan awal dan menjadi fokus kebijakan. Dengan kembali menempatkan ASEAN sebagai fokus kebijakan luar negeri, diharapkan Indonesia dapat meraih kembali peran regional di kawasan Asia Tenggara, yang nantinya akan menjadi modalitas dan daya tawar bagi pengembangan peran yang lebih luas di kawasan lain maupun tingkat global seperti yang telah dijalankan dua periode terakhir pemerintahan Soeharto. Dengan kata lain Indonesia ingin tampil dengan profil politik luar negeri dan diplomasi yang lebih tegas dan konsisten serta tidak perlu keluar dengan berbagai pernyataan kontroversial yang dapat menyinggung martabat dan harga diri lainnya, khususnya di kalangan ASEAN (Adeprianga, 2007)

Disini pemerintahan menghadapi persoalan seberapa jauh Indonesia menghadapi masih dianggap sebagai negara yang memiliki kredibilitas dalam menentukan dan membentuk perkembangan Asia Tenggara dan kebijakan politik pada masa Megawati ini berusaha untuk menyusun strategi dan rencana dalam menjalankan pemerintahannya dan mengedepankan kepentingan nasional demi meraih tujuan nasional Indonesia berkenaan pada politik luar negeri Indonesia ia memprioritaskan dan memegang teguh prinsip yang selama ini dipegang dalam melaksanakan politik luar negeri yakni prinsip bebas aktif (Nurjahan, 2017).

Megawati Soekarnoputri juga melaksanakan politik bebas aktif Indonesia dengan cara melakukan diplomasi dan persahabatan dengan negara-negara lain seperti Korea Utara dan Korea Selatan yang selama ini selalu bertikai, dan yang paling penting adalah Indonesia mengutuk dan mengambil sikap tidak mendukung terhadap agresi militer Amerika Serikat di Irak (Mila et al., 2020).

4. SIMPULAN

Sesuai penelitian bisa ditarik kesimpulan bahwa Gerakan sosial dalam politik luar negeri pada masa Megawati ini yang berasal dan digerakkan oleh masyarakat dalam upaya menuntut perubahan terhadap institusi, regulasi, atau struktur pemerintahan karena pada masa

pemerintahan megawati ini Indonesia banyak mengalami beberapa ancaman seperti Tindakan terorisme yang terjadi di Bali. Bersangkutan dengan adanya peristiwa Bom Bali berdampak langsung pada kondisi investasi, pemerintah mulai melakukan upaya untuk meningkatkan kembali investasi di Indonesia. Baik itu domestik ataupun asing. Yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tergolong masih lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- ' H. (2013). Dinamika Dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 59. <https://doi.org/10.35967/jipn.v10i1.1601>
- Agustinova, D. E. (2018). Penerapan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Sejarah Pada Sekolah Menengah Atas. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 14(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v14i1.19396>

- Dewi, E. (2013). Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 9(1), 99452.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v9i1.535.%p>
- Hardianto, F. (2020). Gerakan Sosial – Politik (Studi Kasus : Gerakan Sosial #2019gantipresiden). *Universitas Negeri Semarang*, 2(1), 1–49.
- Haris, A., AB Rahman, A. Bin, & Wan Ahmad, W. I. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(1), 15–24.
<https://doi.org/10.31947/hjs.v1i1.6930>
- Ii, B. A. B. (1970). *Rajendra Singh Gerakan Sosial Baru hal 122- 123*.
- Ii, B. A. B., Politik, A. G., & Gerakan, P. (1964). 1. 第32回日本産業医学会の頃をめぐって (歴代学会長の思い出). *Sangyo Igaku*, 6(10), 550–551.
https://doi.org/10.1539/joh1959.6.10_550
- jbptunikompp-gdl-adeprianga-23200-11-hand-out-i (1)*. (n.d.).
- Kosanke, R. M. (2019). 済無 *No Title No Title No Title*. 16–29.
- Manulu, D. (2016). GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara. *Populasi*, 18(1), 27–50. <https://doi.org/10.22146/jp.12066>
- Massa, K. (2018). Untuk referensi lainnya, kunjungi <https://sgd.academia.edu/lusiagustianti.1168030131>, 1–21.
- Mila, N., Vida, F., & Adi, D. P. (2020). Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 73. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40866>
- Muttaqien, M., & Dharmaputra, R. (2013). *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*. 5–8.
- Nurjahan, I. R. A. (2017). Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001 – 2004. *Skripsi*, 1–118.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9.
<https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Pratiwi, A. L. (2015). Megawati Soekarnoputri Presiden Wanita Di Indonesia (2001-2004). *Jurnal Patingalloang*, 2(1), 8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26858/patingalloang.v2i1.8410>
- Purboningsih, S. D. (2015). Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik Dalam Pilpres 2014 Di Surabaya. *Jurnal Review Politik*, 05, 1.
- Putri, R. A., Pajriah, S., & Kusmayadi, Y. (2021). Kesenian Gembyung Sebagai Media Dalam Pembelajaran Sejarah Di Sma Negeri 1 Lumbang Kelas X Ips 1 Tahun Ajaran 2018-2019. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 2(1), 45.
<https://doi.org/10.25157/j-kip.v2i1.4770>
- Sadikin, M. (2017). ANALISIS PEMBELAJARAN SEJARAH DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA KURIKULUM 2013 Muhammad. 4(2), 219–227.
- Setiawan, A., & Sulastri, E. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. September.

Wahyuni, K. (2008). *Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode Tahun 2001-2004*. 2022. https://repository.usd.ac.id/2048/2/031314013_Full.pdf

Yani, Y. M. (2007). Politik Luar Negeri. *Politik Luar Negeri*, 1–13.